

PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Rio Pratama¹, Henri Agustin², Salma Taqwa³

¹⁾Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

^{2,3)}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: rioemen@gmail.com

Abstract: *The research aimed to analyze the effect of budget goal clarity, controls accounting and systems reporting for performance accountability of toward government agencies. respondents in this research is the civil servants who served as head of finance , program and evaluation , treasurer and finance staff in 17 SKPD of District Padang Pariaman. The amount of samples in this study was 64 respondents. The sample collection method using a basic formula Yamane, while the method of processing data using multiple linear regression analysis. The partial testing results showed that accounting controls and reporting systems have significant effect on performance accountability of government agencies and simultaneous testing showed significant positive effect on performance accountability of government agencies in Padang Pariaman. The goal budget clarity have no effect on performance accountability of government agencies in Padang Pariaman*

Keywords: *accounting controls, reporting systems, goal budget clarity, performance accountability of government agencies*

How to cite (APA 6th style)

Pratama, R., Agustin, H & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) Seri D, 429-444.

PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena semakin banyaknya instansi pemerintah kelihatan tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Keadaan tersebut menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan public yang lebih baik.

Tuntutan akan kinerja yang lebih baik dari masyarakat ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan (Auditya, 2013). Berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang

disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik.

Setiap instansi pemerintahan atau pihak yang diberi mandat dan amanah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dengan kata lain, laporan pertanggungjawaban tersebut bukan sekadar laporan kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi termasuk juga kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategis yang mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini instansi pemerintah harus dapat melaporkan keberhasilan yang telah dicapai dan berani mengungkapkan kegagalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi.

Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah mengharuskan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Ketidakmampuan menerapkan konsep akuntabilitas secara konsisten di setiap lini pemerintahan merupakan salah satu penyebab lemahnya organisasi sehingga mengakibatkan munculnya penyimpangan pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Di Indonesia pengukuran kinerja dilakukan untuk menanggapi TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 28 tahun 1999 tentang hal yang sama. Menanggapi mandat tersebut maka dikeluarkan Inpres No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya sebagai wujud akuntabilitas (Nasir, 2011).

Sejak diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab yang diperbaharui dengan UU No 32 tahun 2004. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut (Chintya, 2015).

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di dalamnya instansi pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemda. Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat (Putri, 2015). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas, antara lain adalah pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi, motivasi, dan kompetensi.

.Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi tersebut. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat.

Hal lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem pelaporan. Menurut Hidayattullah (2013) sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). LAN dan BPKP mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, objektif dan transparan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya. Penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang. Indudewi (2009) menunjukkan hasil yang sama. Karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran, yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki (Kenis, 1997 dalam Suhartono 2007). Hidayattullah (2013) menyimpulkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solichin, 2006). Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, yaitu:

1. Sejauhmana pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Sejauhmana pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ?
3. Sejauhmana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ?

REVIU TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Jensen and Mackling, 1976). Pada model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak yaitu manajemen dan pemilik. Selanjutnya, manajemen dan pemilik melakukan kesepakatan (*contract*) kerja untuk mencapai manfaat (*utility*) yang diharapkan. Lambert (2001) menyatakan bahwa dalam

kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas pemilik (*principal*), dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen (*agent*) untuk menerima reward. Manfaat yang diterima oleh kedua pihak didasarkan pada kinerja perusahaan.

Pada umumnya, kinerja perusahaan diukur dari profitabilitas (Penman, 2003). Besarnya profitabilitas, selanjutnya diinformasikan oleh manajemen kepada pihak pemilik melalui penyajian laporan keuangan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga agen tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan konsep pertanggungjawaban atas tindakan individual atau organisasi yang telah diamanatkan. Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), Haryanto (2008:16) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen LAKIP. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut perlu diatur prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP agar LAKIP yang disusun tersebut berkualitas, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholders* / pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Bastian (2006) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager publik dalam menjadi alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi. Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode

tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai berikut 1) membandingkan antara rencana dengan realisasinya, 2) membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, 3) membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya, 4) membandingkan antara realisasi dengan standar.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator-indikator masukan, keluaran, manfaat dan dampak (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban hasil kerja seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Pengertian akuntabilitas Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 menyatakan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Konsep akuntabilitas dalam arti luas juga memberikan pengertian bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat, media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta *stakeholders* lain. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat empat aspek yang diukur dalam akuntabilitas publik, yaitu: Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program.

Pengendalian Akuntansi

Menurut Mardiasmo (2009) pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. Sedangkan menurut Paramitha (2016) pengendalian akuntansi merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu, dan menurut krismaji (2010) pengendalian akuntansi (*accounting controls*) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pengendalian akuntansi merupakan suatu perencanaan, prosedur, dan sistem pelaporan yang bersangkutan dengan penjagaan harta atau aset organisasi.

Manfaat Pengendalian Akuntansi

Menurut Carter (2009) manfaat dari pengendalian akuntansi yang didalamnya adalah mengenai pengendalian biaya adalah tanggung jawab atas pengendalian biaya. Pengendalian biaya sebaiknya diberikan kepada individu – individu tertentu yang juga bertanggung jawab untuk menanggarkan biaya yang berada dibawah kendali mereka.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan adalah laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut (Anthony, 2000). Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2005).

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Kusumaningrum, 2010). Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Dedi (2008), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan insyansi sector public untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki,, terdapat beberapa karekteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam rencana strategik daerah (renstrada) dan program pembangunan daerah (properda). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Emile (2004), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran anggaran tersebut. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif, hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang di inginkan sehingga berdampak pada peningkatan kinerja.

Dalam dokumen penyusunan anggaran daerah yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD harus sungguh-sungguh dalam menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Abdullah (2005) menyatakan bahwa tujuan dan sasaran APBD tersebut harus disesuaikan dengan lima kriteria yaitu Spesifik, Terukur, Menantang tapi realistis, Memiliki batas waktu. Ketidakejelasan sasaran anggaran akan meyebabkan pelaksana anggaran akan susah untuk

meimplementasikan anggaran yang ada. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Penelitian terdahulu

Hidayatullah (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di Merauke, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diuji yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di SKPS Merauke.

Herawaty (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi.

Indrayani (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik SKPD Kabupaten Gianyar.

Wahdatul (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan pada 28 SKPD kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Bandung.

Hubungan Pengendalian Akuntansi dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh orang-orang tertentu. Pengendalian akuntansi adalah proses yang di buat untuk memberikan keyakinan yang andal mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundangundangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat (Apriadi, 2011).

H₁: Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hubungan Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja untuk menerapkan anggaran yang sudah ada. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk

mengukur aktivitas aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Agar dapat membantu dan mengembalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. LAN dan BPKB (2000) dalam Indudewi (2008) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, obyektif, dan transparan.

Pelaporan merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Dalam memenuhi akuntabilitas publik, pemerintah melaporkan kinerja secara detail. Dengan demikian, sistem pelaporan yang berjalan baik akan menghasilkan data-data keuangan yang dilaporkan secara detail sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H₂: Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

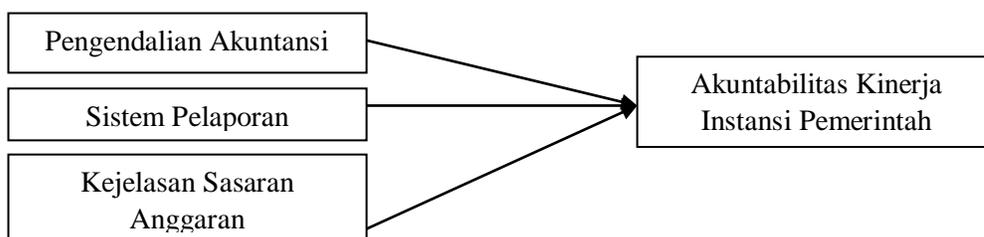
Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Menurut Kenis (1979) dalam Munawar (2006) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran. Jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat. Sehingga dengan meningkatnya kejelasan sasaran anggaran akan berpengaruh pada meningkatnya akuntabilitas kinerja.

H₃: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Kerangka konseptual

Berdasarkan hubungan antarvariabel, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat variable x dengan variable y. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam hal ini menjelaskan serta memperlihatkan pengaruh pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang

Pariaman. Peneliti menjadikan semua populasi sebagai sampel (*total sampling*) karena jumlahnya yang sedikit dan tidak melebihi dari 100 subjek.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi dan dijawab oleh responden yaitu pihak-pihak yang melaksanakan fungsi kepala bagian pada pemerintah daerah. Data dianalisis dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji regresi berganda dengan bantuan program *SPSS for windows versi 16*. Model penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a = konstanta

b_{1,2,3} = koefisien regresi dari variabel independen

X₁ = Pengendalian Akuntansi

X₂ = Sistem Pelaporan

X₃ = Kejelasan Sasaran Anggaran

e = epsilon (variabel-variabel independen yang tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 17 SKPD di Kab Padang Pariaman. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*). Setiap sampel masing-masing terdiri dari 4 responden yaitu setiap kepala bagian di masing – masing SKPD di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 68 kuesioner. Kuesioner yang kembali berjumlah 64 kuesioner, terdapat 1 SKPD tidak mengembalikan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini diantar langsung ke pada masing-masing SKPD dan di jemput langsung dalam rentang waktu 5 November 2018 sampai 13 Desember 2018. Tingkat respon dari responden adalah 89,06%.

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, untuk memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Akuntabilitas_Kinerja	64	4,000	4,929	4,415	0,294
Pengendalian_Akuntansi	64	4,000	5,000	4,686	0,296
Sistem_Pelaporan	64	3,664	5,000	4,354	0,452
Kejelasan_Sasaran_Anggaran	64	3,857	4,714	4,348	0,254
Valid N (listwise)	64				

Sumber: Olahan Data SPSS16

Berdasarkan Tabel dari 64 responden yang diteliti, Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai total rata-rata sebesar 4,415 dengan standar deviasi sebesar 0,294. Hal ini menunjukkan adanya trend positif dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 4,93 yang berarti AKIP SKPD Kab padang pariaman tergolong baik. Untuk variabel pengendalian akuntansi memiliki

nilai rata-rata sebesar 4.69 dengan standar deviasi sebesar 0.296. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat jawaban responden tergolong baik, karena dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum sebesar 5. Variabel sistem pelaporan memiliki nilai rata-rata sebesar 4.35 dengan standar deviasi sebesar 0.452. Berdasarkan nilai tersebut, menunjukkan bahwa tingkat jawaban responden tergolong baik, karena dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum sebesar 5. Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 4,35 dengan standar deviasi sebesar 0.254. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat jawaban responden tergolong baik, karena dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum sebesar 4,71.

Tabel 2
Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil

Instrumen Variabel	Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil
Pengendalian Akuntansi (X ₁)	0,338
Sistem Pelaporan (X ₂)	0,354
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	0,285

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2018

Correlation untuk masing-masing instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,285, untuk pengendalian akuntansi nilai terkecilnya 0,338, sedangkan pemanfaatan sistem pelaporan nilai terkecilnya 0,354 dan untuk kejelasan sasaran anggaran nilai terkecil 0285.

Tabel 3
Uji Reliabilitas

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Pengendalian Akuntansi (X ₁)	0,850	Reliabel
Sistem Pelaporan (X ₂)	0,648	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	0,874	Reliabel

Keandalan konsistensi antara item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk pengendalian akuntansi (X₁) 0,850, sedangkan untuk sistem pelaporan (X₂) 0, 648 dan kejelasan sasaran anggaran (X₃) 0,874. Data ini menunjukkan nilai berada pada kisaran diatas 0,6 dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliable.

Tabel 4
Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardised Residual
N	64
<i>Absolute</i>	0,180
<i>Positive</i>	0,106
<i>Negative</i>	-0,180
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	1,440
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,062

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat tingkat signifikan 5% uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilakukan dengan menguji apakah residual terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan dari uji ini adalah jika nilai

signifikan uji *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05 berarti residual dinyatakan terdistribusi normal, dan begitu juga sebaliknya.

Tabel 5
Uji Heterokedastisitas

Model	T	Sig
(Constant)	0,239	0,812
Pengendalian Akuntansi (X ₁)	2,383	0,080
Sistem Pelaporan (X ₂)	-1,423	0,160
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	-1,124	0,265

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2018

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Absut. disimpulkan bahwa model regresi Heteroskedastisitas.

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Pengendalian Akuntansi (X ₁)	0,862	1,160
Sistem Pelaporan (X ₂)	0,786	1,272
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	0,905	1,104

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2018

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel di atas menunjukkan variable bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variable bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

Tabel 7
Uji F

Model	Sum of Squares	F	Sig.
1 Regression	429.722	13.513	.000
Residual	636.028		
Total	1065.750		

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2018

Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang didapat dengan derajat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Apabila signifikansi F lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa signifikansi adalah 0,000 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah *fix*.

Tabel 8
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.635 ^a	.403	.373	3.256

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2018

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada tabel di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,373. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 37,3 %, sedangkan sisanya sebesar 62,7% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Tabel 9
Regresi Berganda

Model	B	Uji t	Signifikansi
Constanta	0,644	0,918	0,036
Pengendalian Akuntansi (X ₁)	0,764	5,117	0,001
Sistem Pelaporan (X ₂)	0,550	2,611	0,012
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	0,298	1,229	0,124

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2018

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa koefisien β pengendalian akuntansi bernilai positif sebesar 0,764, dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa pengendalian akuntansi **berpengaruh signifikan positif** terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 1 diterima**. Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa koefisien β sistem pelaporan bernilai positif sebesar 0,550 dan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa sistem pelaporan **berpengaruh positif** terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 2 diterima**. Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa koefisien β kejelasan sasaran anggaran bernilai sebesar 0,298 dan nilai signifikansi $0,124 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran **tidak berpengaruh** terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 3 ditolak**.

Pembahasan

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kab. Padang Pariaman. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin tinggi pengendalian akuntansi pegawai di suatu instansi, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan dihasilkan. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Dengan adanya pengendalian akuntansi maka suatu instansi pemerintah dapat, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah (2015) yang meneliti pada SKPD di Kabupaten Merauke bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh

positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah karena pengendalian akuntansi berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kab. Padang Pariaman. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin tinggi sistem pelaporan dalam suatu instansi, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan dihasilkan. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kab. Padang Pariaman. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian hidayatullah (2015) yang meneliti pada SKPD Kabupaten Merauke yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukan penelitian. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak bergantung kepada kejelasan sasaran yang baik yang di buat oleh bagian perencanaan anggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak mempermudah aparat pemerintah dalam menyusun dan mencapai target-target anggaran yang telah di tetapkan. Sehingga dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, tidak dapat mempermudah instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Netty Herawatty (2011) yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki peranan penting dalam menerapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat di simpulkan hasil ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Padang Pariaman keberadaan kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai positif yang dapat menjelaskan bahwa dengan peningkatan nilai kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Namun di pandang tidak memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini terjadi karena ada kecenderungan menyerahkan AKIP kepada yang membidangi, dan kurangnya keterlibatan langsung dalam proses akuntabilitas kinerja. Anggaran yang jelas yang dapat dimengerti harus disusun dengan baik sehingga pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga dapat tercapai dengan baik.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman. (2) Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman. (3) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: (1) variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 37.3%, sedangkan sisanya sebesar 62.7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan belum dapat menjelaskan sepenuhnya pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (2) Pengumpulan data penelitian yang menggunakan kuesioner seperti kurangnya efektif karena responden menjawab pertanyaan terkadang kurang serius dan hanya menjawab dengan asal-asalan saja karena malas membaca pertanyaan di kuesioner tersebut

Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Penelitian ini masih terbatas pada pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran ketaatan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh lebih kuat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Seperti peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah, dll. (2) Di harapkan peneliti selanjutnya menggunakan metode penelitian lain seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga meningkatkan kualitas data yang telah di peroleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2005). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta). *KOMPAK*, .13, 37-67.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap kauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 28-48.
- Anthony, R.N., Dearden, dan Bedford. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen Edisi V. Jakarta: Erlangga.

- Apriadi, A. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. <http://aapapriadi.blogspot.com/2011/09/pengaruh-kejelasan-sasaran-anggaran-dan.html>
- Ardianto dan Rofika. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 197-209.
- Auditya, L. dan Husaini, L. (2013). Analisis Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-41.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
- Chintya. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok. *Artikel*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Haspiarti. (2012). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kota Parepare). *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makasar.
- Herawaty, N. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Simposium Nasional Akuntansi Vol.13.Jambi*.
- Hidayatullah, A. dan Herdjiono, I. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. *Prosiding*. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank.
- Krismiaji. (2010). Sistem Informasi Akuntansi edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Kusmaningrum. (2010). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Megister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. ANDI: Yogyakarta.
- Nasir, A. dan Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Jurnal Ekonomi. Universitas Riau*, 19(02).
- Nordiawan, D. (2008). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Kerangka Konseptual 2010.
- Pramitha, I. A. M. D. dan Gayatri. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3).
- Puspaningsih, A. (2004). Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan Kerja dan Kinerja Manajer Perusahaan Manufaktur. *JAAI*, 8(1), 19-25.
- Puspita, R dan Martani, D. (2012). Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Website Pemda Tahun 2010. *Paper dipresentasikan dalam Sinopsium Nasional Akuntansi 15, Balikpapan, 20-21 September 2012*.
- Putri, E. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). *JOM Fekon*, 2(2).
- Sasongko, C. dan Rumondang, S. (2010). Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.

- Setyaningrum, D. Dan Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Suhaesti, S. R. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. *JOM Fekon*, 3(1).
- Undang Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- www.pariamantoday.com/2016/02/harap-nilai-b-pemkab-padangpariaman